

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut gaya kepemimpinan demokrasi. Dari mulai Kepala desa hingga Pemilihan Presiden dilakukan secara demokrasi, yaitu dengan cara dipilih langsung oleh rakyatnya melalui kegiatan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota Legislatif di DPRD, DPR dan DPD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Pemilihan umum merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis.

Dalam mekanisme pencalonan anggota legislatif tentu saja diperlukan partai politik atau yang biasa yang disebut dengan *kendaraan politik*. Partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat, sekaligus sarana untuk kaderisasi dan rekrutmen pemimpin, baik untuk tingkat nasional maupun daerah, selain itu untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah maka dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari jalur perseorangan (non partai) bersamaan dengan pemilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Masih terbatasnya posisi di ranah publik yang berhasil diraih oleh kaum perempuan, misalnya di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat lokal,

regional maupun nasional sering dijadikan indikasi mengenai besarnya kesenjangan antara peraihan status perempuan dan laki-laki di bidang politik.

Sebenarnya aturan tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif atau Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 55, 56 dan Pasal 58. Bahkan kuotanya ditetapkan paling sedikit 30 persen. Dalam Pasal 55 ditegaskan, daftar bakal calon anggota legislatif memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Kemudian dalam Pasal 56 ayat 2 ditegaskan, di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (UU no. 8 th 2012).

Sudah banyak contoh perempuan yang menjadi pemimpin dan dapat bersaing dengan laki-laki di berbagai daerah yang harus dijadikan pedoman dan kekuatan bagi para calon anggota legislatif perempuan bahwa perempuan tidak lemah, perempuan itu mampu mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat dan dapat menjalankan roda pemerintahan seperti halnya kaum laki-laki, misalnya saja Bupati Subang yaitu Ibu Imas Aryumningsih, dan masih banyak lagi seperti walikota Banjar Ibu Ade Uu Sukaesih, kelebihan apabila perempuan menjadi pemimpin adalah secara naluri, sebagai seorang ibu ada beberapa sifat perempuan yang sebenarnya menjadi modal utama bagi seorang pemimpin.

Perempuan perlu terlibat politik karena mengingat perempuan berjumlah sekitar 50 persen dari penduduk dunia, maka mereka secara prinsipal juga harus

terwakili secara sama diranah politik, khususnya di parlemen. Ini akan menjadi lebih demokratis, representatif, dan adil sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional, selain itu perempuan juga tidak hanya sekedar hadir dalam dunia publik, tetapi juga membawa perubahan atau mewarnainya (Soetjipto, 2012:ix).

Rendahnya representasi perempuan dalam politik formal merupakan masalah penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Karena dengan keadaan seperti itu maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjadi kurang menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan perempuan. Dengan memasukkan berbagai kepentingan perempuan diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan tidak saja perbedaan kepentingan gender, tapi juga perbedaan-perbedaan kelas sosial, suku, agama, orientasi seksual, dan lain-lain.

Agar suara perempuan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan adanya aturan undang-undang dasar tersebut seharusnya pencalonan calon anggota legislatif perempuan untuk masuk atau duduk menjadi anggota dewan DPRD menjadi lebih mudah, namun kenyataannya banyak sekali partai politik yang hanya mendaftarkan nama caleg perempuan sebagai syarat atau pelengkap saja untuk lolos verifikasi dari KPU dan hanya sedikit caleg perempuan yang benar-benar ingin berjuang dan memiliki kemampuan yang tidak setengah hati untuk menjadi calon anggota legislatif. Peraturan tersebut secara tidak langsung merupakan tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kaum perempuan dalam wilayah politik sekaligus

memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa.

Keberhasilan penetapan kuota jelas merupakan langkah awal peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Keinginan memenuhi keterwakilan 30 persen tidak keliru dalam konteks gender dalam pembangunan, tetapi perlu dilandasi oleh suatu perencanaan yang baik. Implementasi keinginan ini dapat saja tertunda dan terhalangi dengan berbagai macam alasan, baik dari diri perempuan itu sendiri maupun dari luar perempuan. Misalnya, sulit mencari perempuan yang mau aktif berpolitik, ada yang mau terjun ke dunia politik tapi tidak berkualitas, tidak dapat izin dari suami, atau prasangka negatif dari laki-laki. Sebagai contoh, keterwakilan 30 persen untuk perempuan berpartisipasi dalam politik sering ditafsirkan secara keliru, yaitu diindikasikan sebagai kehendak perempuan untuk bersaing dengan lelaki atau sebaliknya kaum lelaki merasa porsi mereka di parlemen akan terancam.

Selain itu budaya di Indonesia juga sangat berpengaruh yaitu Budaya *Patriarki*, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki. “Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran domestik misalnya mengurus rumah tangga, perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak dan penjaga moral.”(Romany, 2007:138).

Kuatnya pengaruh budaya bangsa, akan membentuk budaya politik yang kemudian berubah menjadi cara pandang dan persepsi masyarakat mengenai politik. Politik akan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat maskulin

yang dianggap oleh masyarakat tidak cocok dengan sifat perempuan yang feminim.

Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan mencerminkan masih kentalnya ideologi patriarki di mana keikutsertaan perempuan di partai politik atau duduk di parlemen, merupakan bagian dari dominasi kekuasaan atau jabatan suami atau laki-laki. Dengan posisi yang demikian perempuan tampil kurang percaya diri dan bukan atas dasar kemampuannya sendiri atau keinginannya. Diakui memang cukup sulit mengubah kebijakan politik maskulin yang sudah mapan selama ini. Sebagai contoh, penyusunan daftar caleg oleh suatu parpol masih memakai mekanisme lama. Nomor-nomor kecil yang dianggap nomor sakti biasanya telah diisi oleh para petinggi partai yang sebagian besar adalah kaum laki-laki. Selain itu, posisi perempuan kebanyakan di luar struktur partai, atau mungkin segelintir masuk dalam struktur, tetapi hampir tidak ada yang menduduki posisi kunci.

Tabel 1.1
Komposisi Anggota DPRD Kab Sumedang 2014-2019

Fraksi	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
PKB	-	2	2
PKS	2	4	6
PDIP	2	10	12
Golkar	2	8	10
Gerindra	2	4	6
Demokrat	-	4	4
PAN	-	3	3
PPP	1	4	5
Hanura	-	1	1
PBB	1	-	1
JUMLAH TOTAL	10 (20%)	40 (80%)	50 (100%)

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum
Kab Sumedang (28 April 2014)

Tabel 1.1 adalah tabel komposisi anggota DPRD periode 2014, dari hasil Pemilihan Legislatif Kabupaten Sumedang 2014 di mana caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota dewan masa kerja 2014-2019 adalah sebanyak 10 orang dari total 50 orang, namun caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif dari dapil 2 adalah sebanyak 4 orang. Sedangkan yang penulis pilih untuk dijadikan informan adalah sebanyak 6 orang, 3 orang yang lolos, dan 3 orang yang tidak lolos menjadi anggota legislatif.

Mengapa penulis memilih Kabupaten Sumedang padahal masih banyak kabupaten lainnya untuk dijadikan lokasi penelitian, karena menurut penulis di Kabupaten Sumedang ini pendaftar caleg perempuan yang ingin menjadi anggota Legislatif cukup banyak dan beraneka ragam latar belakangnya dibandingkan dengan kabupaten lainnya, kemudian penulis mempersempit kembali menjadi hanya caleg perempuan di dapil 2 Kabupaten Sumedang, keputusan ini diambil oleh penulis karena di dapil 2 cukup mewakili karena ada caleg perempuan yang menang dan adapula caleg yang kalah.

Menurut Goffman, wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (*front stage*) yang ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (*back stage*) atau kamar rias tempat pemain sandiwara mempersiapkan dirinya (Mulyana, 2010:114).

Ketika Caleg sedang berada di depan khalayaknya untuk sosialisasi, ada identitas dan presentasi diri yang berlainan antara kondisi yang satu dengan yang lainnya. Di satu sisi ia harus memerankan sebagai Caleg atau dapat dikatakan dengan panggung depan (*front stage*), presentasi diri yang dibangun seorang

Caleg harus cerdas, berwibawa, percaya diri, memiliki pengetahuan yang luas, sehingga khalayak atau konstituen tertarik untuk memilih caleg tersebut.

Namun ketika ia tidak sedang menjadi seorang caleg ia berada di panggung belakang (*back stage*) maka presentasi diri yang ia bawa akan berbeda dengan ketika ia sedang sosialisasi mengunjungi khalayak atau konstituen, dan bahkan mungkin bisa saja sangat bertolak belakang dengan saat ia menjalani aktivitasnya pada saat sosialisasi pencalegan. Kedua panggung tersebut ini juga dikenal dengan istilah Dramaturgi, di mana seseorang memainkan dua peran dalam dua kondisi yang berbeda yaitu *front stage* dan *back stage*.

Penulis tertarik untuk meneliti **“Bagaimana Komunikasi Politik Caleg Perempuan menjelang pileg 2014”**. Dalam hal ini, penulis akan meneliti Komunikasi Politik Caleg Perempuan dari sisi panggung depan dan panggung belakangnya. Panggung depan subjek yang akan diteliti adalah ketika caleg menyiapkan dan menerapkan komunikasi politik di hadapan khalayaknya, sedangkan panggung belakang adalah peran mereka di luar aktivitas ketika berkomunikasi politik dengan khalayak misalnya kehidupan sehari-hari di lingkungannya seperti keluarga dan tetangganya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Komunikasi Politik caleg perempuan menjelang pileg 2014 di kabupaten Sumedang?”

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana caleg perempuan menyiapkan dan menerapkan komunikasi politiknya menjelang pileg 2014 di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana caleg perempuan dalam kehidupan keseharian di lingkungannya?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui, caleg perempuan menyiapkan dan menerapkan komunikasi politiknya menjelang pileg 2014 di Kabupaten Sumedang?
2. Untuk mengetahui, caleg perempuan dalam kehidupan keseharian di lingkungannya?

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya mengenai komunikasi politik. Selain dari itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperdalam tentang pemahaman konsep-konsep serta teori-teori komunikasi politik.
2. Penulis juga mengharapkan semoga dari penelitian ini dapat digunakan untuk landasan ilmiah dalam menerapkan komunikasi politik di bidang

komunikasi sehingga akan menghasilkan efek atau dampak yang terjadi di dalam sebuah proses komunikasi yang baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap komunikasi politik yang dilakukan oleh para caleg perempuan dapat memberikan pengetahuan tidak hanya memberikan keuntungan bagi caleg perempuan tersebut namun untuk seluruh masyarakat umumnya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak baik untuk pemerintah daerah maupun untuk caleg perempuan lainnya yang akan mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD, maupun DPRD Provinsi.

1.5 Setting Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas dan dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan. Hal-hal yang penulis tulis sebagai pembatasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Subjek penelitiannya adalah caleg perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan di Kabupaten Sumedang daerah pilihan 2. Penulis membatasi penelitian hanya dilakukan di dapil 2 kabupaten Sumedang saja.
2. Objek Penelitiannya adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh caleg perempuan di dapil 2 Kabupaten Sumedang.

3. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret hingga bulan Agustus 2014, lokasi penelitiannya yaitu di seluruh wilayah dapil 2 kabupaten Sumedang yang meliputi (Kec. Tanjungsari, Kec. Pamulihan, Kec. Rancakalong, Kec. Sukasari).
4. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian Dramaturgis Erving Goffman. Meneliti bagaimana caleg perempuan dalam menyiapkan dan menerapkan komunikasi politiknya, serta caleg perempuan dalam kehidupan kesehariannya.

1.5.1 Pengertian Istilah

1. Dramaturgis adalah suatu pendekatan penelitian yang khususnya berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. (Mulyana, 2010:107)
2. Daerah Pemilihan (Dapil) adalah batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.
3. Pemilihan Legislatif (Pileg) adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.
4. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.

5. Konstituen adalah seseorang yang secara aktif mengambil bagian dalam proses menjalankan organisasi dan yang memberikan otoritas kepada orang lain untuk bertindak mewakili dirinya. Seorang konstituen memberikan otoritas kepada pemimpin, bukan sebaliknya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kasus yang akan diteliti adalah bagaimana komunikasi politik caleg perempuan menjelang pileg di kabupaten Sumedang. Disini peneliti mengamati caleg perempuan dalam menyiapkan dan menerapkan komunikasi politiknya menjelang pileg 2014 di Kabupaten Sumedang, serta bagaimana caleg perempuan dalam kehidupan keseharian di lingkungannya diluar aktivitas pada saat sosialisasi pileg.

Sedangkan menurut Effendy,

Komunikasi politik murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda (Effendy, 2007:36).

Pendapat lainnya yaitu menurut Dan Nimmo,

Komunikasi Politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru (Nimmo, 2005:156).

Ilmuwan politik Mark Roelofs menyatakan,

“Politic is talk” atau lebih tepatnya kegiatan politik adalah berbicara, tetapi politik tidak sekedar pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik, tetapi hakikat pengalaman politik dan kondisi dasarnya adalah aktivitas komunikasi antarmanusia. Roelofs memandang bahwa komunikasi meliputi politik, jika orang dihadapkan pada konflik, mereka

akan menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Dengan komunikasi orang berusaha menyelesaikan perselisihan mereka. Di kalangan mereka yang berkecimpung dalam politik praktis, hal semacam itu begitu tampak bagaimana para politisi mengadakan bergaining dengan lawan politiknya, atau terjadinya koalisi, ataupun konsensus, merupakan contoh-contoh bagaimana suatu konflik diturunkan ke dalam komunikasi (Subiakto, 2012:17).

Komunikasi politik dapat diterangkan berdasarkan empat perspektif yang dikemukakan oleh B. Aubrey Fisher (1990), meskipun fenomena komunikasi politik luas dan multi makna dan memiliki paradigma ganda, namun sangat berguna jika empat paradigma atau perspektif dari Fisher tersebut diterapkan dalam komunikasi politik. Keempat paradigma itu adalah mekanistik, psikologis, interaksional, dan pragmatis. Berdasarkan keempat perspektif tersebut, maka ideologi politik, pembicaraan dan dialog politik, pernyataan dan tindakan politik pada hakikatnya adalah komunikasi (Arifin, 2011:91).

Model *mekanistik* dalam komunikasi dan komunikasi politik adalah model yang paling lama dan paling banyak dianut sampai sekarang. Doktrin mekanisme yang diwarnai oleh cara berfikir kausal atau determinis sangat mudah dipahami, terutama dalam merumuskan komunikasi sebagai proses. Berdasarkan doktrin itulah komunikasi dikonseptualisasi sebagai proses yang mekanistik diantara manusia. Sebagai proses yang mekanis, dalam komunikasi terdapat sesuatu (pesan) mengalir melintasi ruang dan waktu dari satu titik (sumber/penerima) kepada titik yang lain (sumber/penerima) secara simultan. Eksistensi empiriknya (lokusnya) terletak atau berada pada saluran. Justru itu model ini digambarkan oleh Fisher sebagai ban berjalan (Arifin, 2011: 91).

Paradigma *psikologis* dijelaskan oleh Arifin, komunikasi dikonseptualisasi sebagai penerimaan dan pengolahan informasi pada diri individu. Perspektif yang dipengaruhi secara sporadis (tidak mendalam sebagaimana pengaruh fisika terhadap perspektif mekanistik) oleh psikologi itu adalah mengadaptasi konsep S-R (*Stimulus-Respons*) dalam komunikasi. Dengan demikian, eksistensi empiriknya (lokusnya) bukan lagi terletak pada saluran sebagaimana dalam perspektif mekanistik, melainkan terletak pada diri individu penerima (komunikasi), yaitu pada kepala individu yang dinamakan “filter konseptual”. Filter itu merupakan keadaan internal dari organisasi manusia, dan secara esensial merupakan konsep kotak hitam (*black box*). Walaupun filter itu tidak dapat diamati secara langsung, namun sangat mempengaruhi setiap peristiwa komunikasi (Arifin, 2011: 95).

Paradigma Interaksional menurut Fisher (1990) komunikasi dikonseptualisasi sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu. Walaupun interaksi itu sering juga disamakan dengan komunikasi terutama komunikasi dua-arah, namun dalam paradigma ini, konsep itu tidak berlaku. Karakteristik utama dari paradigma interaksional, ialah penonjolan nilai individu di atas segala pengaruh lainnya karena manusia dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan, serta masyarakat dan buah pikiran. Justru itu, setiap bentuk interaksi sosial dimulai dan berakhir dengan mempertimbangkan diri manusia. Itulah sebabnya perspektif ini, dipandang paling manusiawi di antara semua perspektif komunikasi yang ada (Arifin, 2011: 97).

Revolusi yang juga belum selesai terjadi dalam perspektif yang relatif paling baru dan sedang dalam proses perkembangan, yaitu perspektif *pragmatis*. Sesuai dengan namanya, perspektif ini memusatkan perhatian pada *pragma* atau *tindakan*. Jika dalam model interaksi tindakan yang diamati adalah tindakan sosial dalam konteks kultural, maka dalam model pragmatis tindakan yang diamati, menurut Fisher (1990) adalah tindakan atau “perilaku yang berurutan” dalam “konteks waktu” dalam “sebuah sistem sosial”. Tindakan atau perilaku tersebut dapat berupa ucapan, tindakan, atau perilaku (Arifin, 2011: 99).

Sebagai disiplin ilmu, komunikasi politik menurut McNair (2003) memiliki lima fungsi dasar, yaitu

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
- c. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
- d. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Disini media berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*), dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.
- e. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa (Cangara, 2011:33)

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada perspektif Dramaturgi dari Erving Goffman. Pendekatan dramaturgi ingin mengungkapkan kehidupan sosial seseorang, sebagai serangkaian aksi pertunjukkan di panggung. Menurut Goffman, kebanyakan atribut dan aktivitas manusia digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang kita pakai. Cara kita berdandan ketika kita diwawancarai dalam rangka melamar pekerjaan berbeda dengan cara kita berdandan ketika menghadiri pengajian. Pendeknya, kita “mengelola” informasi yang kita berikan kepada orang lain. Kita mengendalikan pengaruh yang akan ditimbulkan busana kita, penampilan kita dan kebiasaan kita terhadap orang lain supaya orang lain memandang kita sebagai orang yang ingin kita tunjukkan (Mulyana, 2010:112).

Goffman menunjukkan bahwa drama kehidupan sosial dan drama teater menggunakan teknik yang sama yaitu: aktor sosial, seperti aktor teater, bergantung pada busana, *make up*, pembawaan diri, dialek, pernik- pernik dan alat dramatik lainnya untuk memproduksi pengalaman dan pemahaman realitas yang sama. (Mulyana, 2010:112-113)

Erving Goffman mencoba mengungkap sisi kehidupan manusia dalam panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan ibarat panggung sandiwara yang dapat ditonton oleh khalayak. Panggung belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang tempat pemain sandiwara mempersiapkan diri dan berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan.

